



KEBENARAN PRAGMATIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM: ANALISIS AKSILOGIK TERHADAP NILAI DAN ETIKA KEHIDUPAN SOSIAL

Mesi Rawanita^{1*}, Warul Walidin²

¹Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, ²UIN Ar-Raniry Banda Aceh
241003005@student.ar-raniry.ac.id^{1*}, warul.walidin@ar-aniry.ac.id²

Abstrak

Artikel ini menganalisis konsep kebenaran pragmatik dari perspektif Islam melalui pendekatan aksiologi. Dalam Islam, kebenaran tidak hanya dinilai dari kesesuaiannya dengan fakta, tetapi juga dari nilai-nilai moral dan manfaat sosial yang ditimbulkan. Konsep ini dibandingkan dengan filsafat pragmatisme Barat yang memprioritaskan utilitas praktis kebenaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur terhadap Al-Qur'an, Hadis, serta karya para filsuf Islam dan pemikir pragmatik seperti Peirce, James, dan Dewey. Studi ini menemukan bahwa Islam menekankan dimensi moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam menilai kebenaran, sehingga memperluas pemahaman pragmatik dengan perspektif spiritual. Artikel ini merekomendasikan pendekatan integratif antara nilai pragmatik dan aksiologi Islam untuk memecahkan tantangan sosial kontemporer, termasuk dalam bidang politik, pendidikan, dan kehidupan bermasyarakat. Dengan menekankan keadilan, transparansi, dan etika dalam implementasinya, Islam dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil.

Kata Kunci: Kebenaran pragmatik, aksiologi Islam, etika, moralitas, perspektif Islam

Abstract

This article analyzes the concept of pragmatic truth from an Islamic perspective through an axiological approach. In Islam, truth is evaluated based on factual alignment, moral values, and social benefits. This concept is compared to Western pragmatic philosophy, which prioritizes the practical utility of truth. Using a qualitative method and literature review of the Qur'an, Hadith, and works of Islamic philosophers alongside pragmatist thinkers like Peirce, James, and Dewey, the study finds that Islam emphasizes moral dimensions, justice, and social responsibility in assessing truth, thereby broadening pragmatic understanding with spiritual perspectives. This article recommends an integrative approach combining pragmatic values and Islamic axiology to address contemporary social challenges, including politics, education, and community life. Islam significantly fosters harmonious and equitable societies by emphasizing justice, transparency, and ethics.

Keywords: Pragmatic truth, Islamic axiology, ethics, morality, Islamic perspective

PENDAHULUAN

Kebenaran merupakan salah satu konsep fundamental yang telah lama menjadi pusat perhatian dalam berbagai disiplin ilmu, filsafat, dan kebudayaan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kebenaran memainkan peran yang sangat vital karena ia berkaitan dengan pembentukan norma, nilai, dan prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam berbagai dimensi kehidupan, baik itu secara individu, sosial, maupun moral. Tanpa kebenaran, masyarakat akan mengalami disorientasi nilai, ketidakpastian, dan ketidakadilan. Dalam filsafat, kebenaran sering dikaitkan dengan konsep keadilan, kesucian, dan realitas yang objektif, di mana keberadaan suatu kebenaran dapat diukur melalui kesesuaian dengan realitas yang ada (Al-Ghazali, 1963; Nisa, 2016).

Dalam ranah ilmu pengetahuan dan filsafat, berbagai pendekatan telah dikembangkan untuk memahami kebenaran. Salah satunya adalah pendekatan pragmatik yang mengukur kebenaran tidak semata-mata dari kesesuaian dengan teori atau kenyataan objektif, melainkan dari manfaat praktis yang dapat dihasilkan oleh kebenaran tersebut. Konsep kebenaran pragmatik pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Amerika seperti Charles Sanders Peirce, William James, dan John Dewey, yang berpendapat bahwa kebenaran seharusnya dilihat dari hasil dan efek praktisnya dalam kehidupan manusia (Bakewell & James, 1907; James, 2006). Peirce (1878) misalnya, dalam konsepnya tentang "*verifiability*" atau "*pragmatisme verifikasi*," mengungkapkan bahwa kebenaran dapat dipastikan melalui penerimaan dan kebermanfaatannya dalam situasi praktis yang konkret (Peirce, 1878).

Sementara itu, aksiologi dalam filsafat mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sesuatu, termasuk kebenaran. Dalam konteks aksiologi, kebenaran dilihat bukan hanya dari segi praktisnya, tetapi juga dari perspektif nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang memengaruhi etika, moralitas, dan perilaku sosial. Aksiologi menilai kebenaran tidak hanya sebagai konsep teoritis, tetapi juga dalam aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, yang berhubungan dengan pembentukan kebijakan, norma sosial, dan interaksi antar individu dalam masyarakat.

Dalam Islam, kebenaran dianggap sebagai suatu hal yang sangat mendasar dan tak terpisahkan dari prinsip kehidupan yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Qur'an, kebenaran sering digambarkan dengan kata "*al-Haqq*", yang merujuk pada Allah sebagai sumber segala kebenaran (Departemen Agama Republik Indonesia, 2019)(Qur'an, 22:62). Kebenaran dalam Islam tidak hanya terbatas pada kebenaran teoritis, tetapi juga mencakup kebenaran moral dan sosial yang berhubungan erat dengan keadilan dan integritas. Islam mengajarkan bahwa kebenaran adalah fondasi untuk mencapai kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Oleh karena itu, relevansi perspektif Islam dalam menilai kebenaran sangat signifikan, tidak hanya dalam aspek teologis, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan moral.

Islam mengajarkan bahwa manusia, sebagai makhluk sosial, memiliki tanggung jawab moral untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran, baik itu dalam

aspek agama, sosial, maupun hukum. Dalam konteks ini, pandangan Islam terhadap kebenaran memiliki dimensi yang lebih luas, di mana kebenaran tidak hanya diukur berdasarkan kesesuaian dengan realitas atau teori, tetapi juga terkait dengan penerapan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sosial dan interaksi antar individu (Fazrul, 1984; Masang, 2020). Sejalan dengan hal ini, dalam perspektif Islam, kebenaran harus selalu dibarengi dengan nilai-nilai etika dan moral, yang pada gilirannya akan membentuk karakter dan hubungan sosial yang harmonis.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, artikel ini berfokus pada dua masalah utama. Pertama, artikel ini akan membahas konsep kebenaran pragmatik dan relevansinya dalam kehidupan sosial menurut Islam, dengan mengkaji bagaimana Islam menilai kebenaran dalam konteks sosial, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Kedua, artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana aksiologi Islam dapat memberikan pandangan tentang kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak hanya terkait dengan pengetahuan tetapi juga dengan moralitas, keadilan, dan etika.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang kebenaran pragmatik dalam Islam dan aksiologi Islam sebagai panduan dalam menilai kebenaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kebenaran pragmatik dalam filsafat Barat dan pemahaman Islam, serta menyusun perspektif aksiologi Islam dalam menilai kebenaran, dengan menekankan nilai-nilai etika dan moralitas dalam ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Dalam studi literatur ini, penulis akan mengkaji dan menganalisis teks-teks Al-Qur'an, Hadis, serta karya-karya para filsuf Islam dan ulama yang membahas tentang kebenaran, etika, dan aksiologi dalam Islam. Beberapa sumber literatur yang relevan akan digunakan untuk mendalami hubungan antara kebenaran pragmatik dan pandangan Islam, termasuk buku-buku filsafat Islam, tafsir, serta karya-karya filsuf seperti Al-Farabi, Ibn Sina, dan Al-Ghazali.

Selain itu, analisis akan mencakup pemahaman tentang bagaimana Islam memandang kebenaran tidak hanya dari sudut pandang spiritual, tetapi juga dalam konteks sosial dan moral. Penelitian ini juga akan mencakup literatur kontemporer tentang pragmatik, termasuk pandangan-pandangan filsuf pragmatik seperti William James dan John Dewey, untuk memahami relevansi kebenaran pragmatik dalam kehidupan sosial menurut Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Kebenaran Pragmatik

Kebenaran pragmatik, yang berasal dari tradisi filsafat pragmatisme, adalah pendekatan terhadap kebenaran yang tidak hanya mengutamakan kesesuaian dengan realitas objektif atau konsistensi logis, tetapi juga lebih menekankan pada

konsekuensi praktis atau hasil yang dapat dihasilkan dari suatu ide atau pernyataan. Dalam pandangan pragmatik, suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut dapat diaplikasikan dengan efektif dalam situasi praktis dan memberi manfaat yang konkret bagi individu atau masyarakat. Dengan kata lain, kebenaran pragmatik mengutamakan nilai kegunaan dan hasil dalam kehidupan sehari-hari sebagai ukuran dari kebenaran itu sendiri.

Pragmatisme sebagai suatu aliran filsafat pertama kali muncul pada akhir abad ke-19 di Amerika Serikat, dengan tokoh-tokoh utama seperti Charles Sanders Peirce, William James, dan John Dewey. Pragmatisme menekankan pada pengujian ide-ide melalui pengalaman dan hasil praktis, yang artinya kebenaran tidak hanya terletak pada kesesuaian ide dengan dunia nyata, tetapi juga pada kemampuannya untuk menyelesaikan masalah dan berfungsi secara efektif dalam kehidupan sosial dan personal (Lewis & Dewey, 1930; Peirce, 1878). Secara lebih sederhana, menurut pragmatisme, "kebenaran" adalah apa yang bekerja dengan baik dalam konteks kehidupan manusia.

1. Pandangan Para Filsuf tentang Kebenaran Pragmatik

Charles Sanders Peirce (1839–1914) merupakan tokoh pertama yang mengembangkan konsep pragmatik dalam filsafatnya. Peirce memperkenalkan gagasan bahwa kebenaran harus dilihat dari efek praktis yang dihasilkan oleh ide atau klaim tersebut. Dalam karyanya yang terkenal, *"How to Make Our Ideas Clear"* (1878), Peirce menyatakan bahwa kebenaran sebuah pernyataan dapat diverifikasi melalui pragmatisme verifikasi, yakni melalui pengujian dalam praktik dan pengalaman. Peirce menekankan bahwa suatu ide yang benar adalah ide yang jika diterapkan akan menghasilkan efek yang dapat diterima dalam pengalaman nyata dan dapat diterima oleh komunitas ilmiah (Peirce, 1878).

William James (1842–1910) adalah filsuf pragmatis yang menekankan aspek praktis dari kebenaran dalam kehidupan manusia. Dalam bukunya *"Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking"* (1907), James berargumen bahwa kebenaran harus diukur berdasarkan apakah suatu ide atau teori bermanfaat dalam kehidupan praktis. James mengemukakan bahwa kebenaran tidak bersifat statis dan abadi, melainkan merupakan proses yang terus berkembang yang terikat pada kebutuhan, keinginan, dan konteks sosial. Bagi James, kebenaran adalah sesuatu yang berguna untuk individu dalam menghadapi tantangan hidup mereka (Bakewell & James, 1907).

John Dewey (1859–1952) juga memandang kebenaran dari perspektif pragmatis yang menekankan pada nilai praktis dan kegunaan dalam kehidupan sosial. Dewey mengajukan bahwa kebenaran bukanlah entitas statis yang ditemukan dalam realitas objektif, melainkan lebih kepada proses yang berkembang dalam pencarian solusi untuk masalah praktis yang dihadapi individu dan masyarakat. Dalam bukunya *"The Quest for Certainty"* (1929), Dewey mengajukan bahwa kebenaran adalah suatu hasil yang diperoleh melalui eksperimen sosial dan interaksi manusia, di mana ide-

ide diuji dan diperbaharui dalam konteks masalah sosial yang dihadapi (Lewis & Dewey, 1930).

Dengan demikian, pandangan pragmatisme dari Peirce, James, dan Dewey menggambarkan bahwa kebenaran adalah suatu hal yang sangat bergantung pada efektivitasnya dalam memecahkan masalah praktis dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadikan kebenaran pragmatik sangat dinamis, kontekstual, dan terikat dengan situasi sosial.

2. Kebenaran Pragmatik dalam Konteks Sosial

Dalam konteks sosial, kebenaran pragmatik berfokus pada bagaimana suatu pernyataan atau ide dapat diterima dan diterapkan untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh individu atau komunitas. Kebenaran pragmatik tidak hanya dipandang dari sudut pandang teoritis, tetapi lebih pada dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan kemanusiaan.

Sebagai contoh, dalam dunia pendidikan, sebuah teori atau pendekatan pendidikan bisa dianggap benar jika dapat meningkatkan kualitas belajar dan membantu memecahkan masalah pendidikan yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini, kebenaran bukan hanya soal kesesuaian teori dengan prinsip-prinsip ilmiah, tetapi lebih kepada apakah teori tersebut dapat membawa dampak positif dalam memecahkan masalah pendidikan, seperti meningkatkan motivasi belajar, mengurangi tingkat putus sekolah, atau memberikan akses pendidikan yang lebih adil.

Begitu pula dalam kehidupan sosial secara umum, kebenaran pragmatik mempertimbangkan pengaruh praktis suatu gagasan terhadap struktur sosial, ekonomi, dan budaya. Misalnya, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi atau kesehatan akan dianggap benar jika kebijakan tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada, seperti kemiskinan, pengangguran, atau ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, pragmatisme menekankan pentingnya pengujian empiris dan evaluasi berkelanjutan terhadap ide atau teori yang diterapkan dalam kehidupan sosial.

3. Perspektif Islam tentang Kebenaran

Dalam ajaran Islam, kebenaran memiliki makna yang lebih mendalam dan spiritual. Konsep kebenaran dalam Islam tidak hanya terbatas pada kebenaran sebagai kesesuaian fakta atau realitas duniawi, tetapi juga berkaitan dengan kebenaran moral dan etik yang berasal dari wahyu Tuhan. Dalam Al-Qur'an, kebenaran sering kali disebut dengan al-Haqq (yang berarti kebenaran atau yang hak), yang merujuk pada Allah sebagai sumber segala kebenaran dan keadilan. Sebagai contoh, dalam Surat Al-Hajj ayat 62, Allah berfirman:

"Itulah Allah, Rabb kalian. Tidak ada Tuhan selain Dia, Pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dialah yang memiliki segala sesuatu yang ada."

Konsep kebenaran dalam Islam sangat erat kaitannya dengan nilai moral dan keadilan. Kebenaran bukan hanya tentang fakta yang benar secara objektif, tetapi

juga tentang bagaimana manusia hidup sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang diturunkan Allah melalui wahyu-Nya dan ajaran Rasul-Nya. Dalam Islam, kebenaran mengandung dimensi moral yang sangat penting, yang meliputi kejujuran, integritas, dan komitmen untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial.

Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat banyak penekanan tentang pentingnya berkata benar dan mengikuti kebenaran sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah dan upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Kebenaran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang terus berbicara dengan benar sampai ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur." (HR. Bukhari No. 6094)(Al Bukhari, 1985)

Dalam konteks sosial, Islam mengajarkan bahwa kebenaran harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan. Oleh karena itu, kebenaran dalam Islam tidak hanya mencakup kebenaran teoritis, tetapi juga kebenaran yang aplikatif, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Konsep as-Sawab (benar atau tepat) juga mengajarkan pentingnya menilai sesuatu berdasarkan keadilan dan prinsip moral yang ditentukan oleh Allah.

Dengan demikian, perspektif Islam menambahkan dimensi etika dan spiritual dalam kebenaran, di mana kebenaran bukan hanya dilihat dari segi efektivitas praktis, tetapi juga seberapa jauh kebenaran itu sesuai dengan tuntunan moral dan keadilan yang diajarkan dalam ajaran agama.

Aksiologi Islam dalam Menilai Kebenaran

Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai, termasuk nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan, keindahan, dan moralitas. Secara harfiah, aksiologi berasal dari kata Yunani, yaitu "axios" yang berarti nilai dan "logos" yang berarti ilmu atau studi. Dalam konteks Islam, aksiologi mengacu pada kajian tentang nilai-nilai yang diberikan oleh Allah dalam syariat-Nya, yang mencakup aspek moral dan etika yang harus dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam setiap aspek kehidupan mereka.

Aksiologi dalam Islam lebih dari sekadar sebuah teori, melainkan juga sebuah praktik hidup yang harus diterapkan dalam hubungan antara individu, masyarakat, dan Tuhan. Dalam hal ini, aksiologi Islam mengarahkan umat Islam untuk menilai segala sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam wahyu Allah, baik yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu tujuan utama dari aksiologi Islam adalah untuk membentuk akhlak yang mulia dan menjadikan umat Islam sebagai contoh masyarakat yang adil dan bermoral.

Dalam konteks kebenaran, aksiologi Islam tidak hanya mencakup pengertian kebenaran sebagai kesesuaian fakta dengan realitas duniawi, tetapi juga menekankan pada kebenaran moral yang harus dijalankan oleh setiap Muslim dalam kehidupan mereka. Kebenaran dalam Islam memiliki dimensi yang lebih luas dan tidak hanya

terbatas pada kebenaran ilmiah atau sosial, tetapi juga pada kebenaran yang berkaitan dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.

1. Aksiologi Islam dalam Konteks Akhlak dan Etika

Dalam Islam, akhlak atau moralitas memiliki peran sentral dalam kehidupan sehari-hari, karena akhlak yang baik adalah salah satu cerminan dari kebenaran yang harus dijalankan oleh setiap Muslim. Islam mengajarkan bahwa manusia seharusnya selalu berperilaku dengan akhlak mulia yang tercermin dalam kejujuran, keadilan, kesabaran, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia dan terhadap Allah. Oleh karena itu, dalam perspektif aksiologi Islam, kebenaran tidak hanya dilihat dari segi faktual atau teoritis, tetapi juga dari segi etika dan moral.

Sebagai contoh, dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Dia akan memperbaiki amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu." (QS. Al-Ahzab: 70-71)

Ayat ini menunjukkan bahwa kebenaran merupakan nilai yang sangat penting dalam Islam, yang tidak hanya berkaitan dengan kata-kata yang diucapkan, tetapi juga dengan sikap dan perbuatan yang mencerminkan kejujuran dan tanggung jawab sosial. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya kebenaran sebagai bagian dari akhlak yang baik: *"Kebenaran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga." (HR. Bukhari dan Muslim No. 6094)*

Dari sudut pandang aksiologi Islam, kebenaran adalah nilai fundamental yang harus dipegang teguh oleh setiap Muslim, karena kebenaran menjadi dasar bagi pembentukan akhlak yang baik, yang pada gilirannya akan membentuk individu dan masyarakat yang bertanggung jawab, adil, dan bermoral.

2. Nilai Kebenaran dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, kebenaran bukanlah sekadar suatu konsep filsafat, tetapi lebih dari itu, kebenaran adalah nilai yang hakiki dan merupakan inti dari kehidupan beragama. Dalam Al-Qur'an, Allah sering kali menyebutkan kata-kata yang berhubungan dengan kebenaran, seperti *Al-Haqq* (yang benar) dan *As-Sawab* (benar atau tepat), yang mengandung makna bahwa kebenaran berasal dari Allah dan harus menjadi landasan hidup setiap Muslim.

Sebagai contoh, dalam surat Al-Isra' ayat 81, Allah berfirman: *"Dan katakanlah: 'Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.'"*

Ayat ini mengungkapkan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang hakiki dan pasti akan mengalahkan kebatilan. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran yang sudah ditentukan oleh Allah dan berlaku dalam segala hal, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun spiritual. Dalam konteks ini, kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam wahyu Allah, yaitu dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW.

Lebih lanjut, dalam perspektif Islam, kebenaran juga menjadi dasar dalam membentuk karakter manusia yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Seorang Muslim yang hidup dalam kebenaran akan selalu menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan dan perkataannya. Oleh karena itu, kebenaran dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan atau informasi, tetapi juga dengan niat dan tindakan yang sejalan dengan nilai moral dan etika Islam.

3. Kebenaran dan Etika Islam

Islam mengajarkan bahwa kebenaran tidak dapat dipisahkan dari etika dan akhlak. Kebenaran dalam Islam adalah suatu nilai yang berakar pada keimanan kepada Allah dan harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, maupun dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, dalam Islam, kebenaran bukan hanya sekadar hal yang bersifat intelektual atau teoritis, tetapi lebih dari itu, kebenaran harus tercermin dalam perilaku moral yang sesuai dengan tuntunan agama.

Etika Islam mengajarkan bahwa seseorang harus berbicara yang benar, berbuat yang benar, dan menegakkan keadilan dengan jujur tanpa memihak. Hal ini mengarah pada terciptanya masyarakat yang adil, di mana setiap individu dihargai haknya, keadilan ditegakkan, dan tidak ada penindasan terhadap yang lemah. Sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan..."* (QS. An-Nahl: 90)

Dalam konteks etika sosial, kebenaran dalam Islam juga terkait dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Masyarakat yang dibangun berdasarkan prinsip kebenaran akan menciptakan lingkungan yang harmonis, di mana setiap individu saling mendukung, menghargai, dan bekerja sama untuk kebaikan bersama.

4. Kebenaran dalam Hubungan Sosial

Islam menempatkan kebenaran sebagai nilai dasar dalam hubungan sosial. Kebenaran yang diterapkan dalam hubungan sosial mencakup keadilan, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial. Dalam ajaran Islam, umat Islam diwajibkan untuk selalu mengedepankan kebenaran dalam segala bentuk interaksi sosial, baik dalam hubungan keluarga, masyarakat, maupun negara. Al-Qur'an mengajarkan bahwa kebenaran harus dijunjung tinggi dalam pergaulan sosial agar tercipta keadilan dan kedamaian dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Baqarah ayat 177, Allah berfirman:

"Bukanlah kebaikan itu hanya menghadap wajah ke timur atau ke barat, tetapi kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab-Nya, dan nabi-nabi-Nya, dan memberikan hartanya dengan cinta kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, dan orang yang membutuhkan."

Ayat ini menunjukkan bahwa kebenaran sosial dalam Islam melibatkan kepedulian terhadap sesama, keadilan, dan pemberian hak-hak yang semestinya kepada yang berhak. Kebenaran tidak hanya berbicara soal kebenaran pribadi, tetapi juga mencakup hak-hak sosial yang menciptakan masyarakat yang saling menghormati dan memperhatikan kesejahteraan bersama.

Dalam perspektif hak asasi manusia, Islam juga mengajarkan bahwa kebenaran harus mencakup penghargaan terhadap martabat manusia dan hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan, di mana setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam masyarakat yang tidak hanya berbasis pada kebenaran, tetapi juga keadilan sosial yang merata.

Implementasi Kebenaran Pragmatik dalam Kehidupan Sosial Islam

1. Kebenaran dalam Praktik Kehidupan Sehari-hari

Dalam kehidupan sehari-hari, kebenaran dalam perspektif pragmatik dalam Islam mengandung nilai yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap individu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama dalam menjalani kehidupan sosialnya. Kebenaran bukan hanya sesuatu yang dipahami secara teoritis, tetapi harus diterapkan dalam praktik konkret, baik dalam interaksi personal maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Dalam Islam, kebenaran tidak hanya berkaitan dengan berbicara jujur atau menepati janji, tetapi juga menyangkut setiap aspek moralitas dan keadilan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai contoh, dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan pentingnya berbicara dengan kebenaran dalam kehidupan sosial: *"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Dia akan memperbaiki amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu."* (QS. Al-Ahzab: 70-71)

Ayat ini menegaskan bahwa kebenaran harus menjadi dasar dalam setiap tindakan dan ucapan seorang Muslim. Tidak hanya dalam urusan pribadi, tetapi juga dalam kehidupan sosial. Kebenaran, dalam hal ini, juga meliputi tanggung jawab sosial, di mana setiap individu diharapkan untuk bertindak adil dan mematuhi hak-hak orang lain, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, atau dalam masyarakat umum.

Dalam kehidupan sehari-hari, kebenaran pragmatik dalam Islam juga mengajarkan bahwa kejujuran harus diterapkan dalam transaksi ekonomi, interaksi sosial, bahkan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sebagai contoh, Islam melarang praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip kebenaran, seperti penipuan, riba, dan korupsi. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, disebutkan bahwa: *"Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami."* (HR. Muslim)

Kehidupan sehari-hari seorang Muslim harus mencerminkan kebenaran dalam segala aspek, dari hal-hal kecil hingga besar, seperti berbicara dengan jujur, menepati janji, dan berperilaku sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kejujuran dan keadilan.

2. Kebenaran dalam Politik dan Pemerintahan

Prinsip kebenaran dalam Islam juga memiliki implikasi penting dalam bidang politik dan pemerintahan. Dalam konteks ini, kebenaran pragmatik berfungsi sebagai penuntun moral dalam pembuatan kebijakan publik, pengambilan keputusan, dan penerapan hukum. Islam mengajarkan bahwa seorang pemimpin atau penguasa harus

senantiasa berpegang pada prinsip keadilan dan kebenaran, dan menjauhi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Konsep kebenaran dalam politik Islam bukan hanya tentang menyatakan yang benar, tetapi juga tentang keadilan dalam mengatur masyarakat. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: *"Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil."* (QS. An-Nisa': 58)

Ayat ini menunjukkan bahwa kebenaran dalam konteks pemerintahan Islam harus mencakup keadilan sosial. Seorang pemimpin atau pejabat publik dalam Islam harus menerapkan kebijakan yang tidak hanya berdasarkan kebenaran tetapi juga berkeadilan, memastikan bahwa hak-hak setiap individu di dalam masyarakat dijamin dan tidak ada penindasan atau ketidakadilan.

Selain itu, kebenaran dalam pemerintahan Islam juga melibatkan transparansi dan akuntabilitas. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya seorang pemimpin yang jujur dan amanah dalam memimpin umatnya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah bersabda: *"Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya."* (HR. Bukhari)

Kebeneran dalam politik dan pemerintahan Islam menuntut agar setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga, penerapan kebenaran dalam politik bukan hanya berbicara mengenai kejujuran pribadi, tetapi juga menyangkut kebijakan publik yang mendasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.

3. Kebeneran dalam Pendidikan dan Etika Sosial

Pendidikan dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan etika sosial yang akan membentuk karakter individu. Dalam konteks ini, kebenaran pragmatik berperan penting dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berperilaku moral dan beretika. Al-Qur'an dan hadis menekankan pentingnya pendidikan yang mengarah pada pembentukan akhlak yang baik, dengan kebenaran sebagai salah satu landasan utama dalam mendidik generasi yang berakhlak mulia.

Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: *"Dia-lah yang mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama..."* (QS. At-Tawbah: 33)

Ayat ini menunjukkan bahwa kebenaran adalah nilai yang harus diajarkan dalam pendidikan Islam untuk membentuk pemahaman yang benar tentang ajaran agama, serta untuk membentuk karakter yang sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan yang baik menurut Islam tidak hanya memberikan pengetahuan akademik tetapi juga mendidik anak-anak untuk mengamalkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Selain itu, dalam kehidupan sosial, penanaman nilai kebenaran sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Pendidikan di dalam keluarga, di sekolah, dan dalam masyarakat harus mengajarkan nilai kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keadilan. Sebagai contoh, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menyatakan: *"Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya."* (HR. Bukhari)

Prinsip kebenaran dalam pendidikan dan etika sosial Islam juga mengajarkan bahwa setiap individu harus bertindak dengan keadilan dan kebaikan, baik dalam interaksi sosial maupun dalam berbisnis, bekerja, dan bernegosiasi. Islam mengajarkan bahwa kebenaran harus mencakup segala aspek kehidupan dan harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan, baik dalam keluarga maupun dalam lembaga pendidikan formal.

Tantangan dalam Menyelaraskan Kebenaran Pragmatik dengan Aksiologi Islam

1. Kesenjangan antara Teori dan Praktek

Salah satu tantangan utama dalam menyelaraskan kebenaran pragmatik dengan aksiologi Islam adalah kesenjangan antara teori dan praktek dalam penerapan kebenaran di masyarakat Muslim (Fazrul, 1984). Meskipun ajaran Islam menekankan pentingnya kebenaran, kejujuran, dan keadilan, dalam praktiknya, seringkali terdapat kontradiksi antara nilai-nilai ini dan apa yang terjadi dalam kehidupan sosial dan politik sehari-hari.

Dalam masyarakat yang pluralistik dan kompleks, implementasi kebenaran pragmatik yang mengutamakan efektivitas dalam memecahkan masalah praktis seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang ada dalam ajaran Islam. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, penipuan, korupsi, dan ketidakadilan masih terjadi meskipun terdapat pemahaman yang jelas tentang kebenaran dalam Islam. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti pengaruh budaya, ketidakadilan struktural, dan kurangnya kesadaran moral di kalangan sebagian masyarakat Muslim (Rahman, 2020).

Salah satu contoh kesenjangan ini dapat dilihat dalam konteks politik. Dalam beberapa negara dengan mayoritas Muslim, meskipun para pemimpin negara mengklaim menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dalam prakteknya, kebijakan yang diambil sering kali tidak mencerminkan kebenaran dan keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Misalnya, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, korupsi, dan penindasan terhadap kelompok tertentu bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan keadilan sosial.

Al-Qur'an mengingatkan bahwa kebenaran harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan: *"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil."* (QS. An-Nisa' 58)

Kesenjangan antara teori dan praktek ini menunjukkan bahwa meskipun ada pemahaman yang jelas tentang kebenaran dalam Islam, implementasinya dalam kehidupan sosial sering kali terhambat oleh berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi keadilan dan kebenaran.

2. Perbedaan Interpretasi Kebenaran

Tantangan kedua yang muncul dalam menyelaraskan kebenaran pragmatik dengan aksiologi Islam adalah perbedaan interpretasi kebenaran dalam konteks sosial dan moral di kalangan umat Islam. Dalam Islam, terdapat berbagai mazhab dan aliran pemikiran yang dapat mempengaruhi cara pandang terhadap konsep kebenaran.

Sebagai contoh, dalam isu-isu seperti hak asasi manusia, gender, atau hak minoritas, terdapat perbedaan interpretasi antara kelompok tradisional dan kelompok progresif dalam umat Islam. Sebagian kelompok mungkin menekankan pentingnya kebenaran yang tercermin dalam hukum syariat yang konservatif, sementara kelompok lain lebih menekankan penerapan nilai-nilai kebenaran yang lebih sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman dan keadilan sosial (Arifin et al., 2018; Baderin et al., 2010).

Misalnya, dalam masalah hak-hak perempuan dalam Islam, terdapat perbedaan interpretasi mengenai kebenaran terkait dengan posisi perempuan dalam masyarakat. Kelompok konservatif mungkin mengutip teks-teks agama yang lebih tradisional yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih terbatas, sementara kelompok progresif lebih menekankan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang diajarkan dalam Al-Qur'an, seperti dalam ayat yang menyatakan: *"Barang siapa yang berbuat amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga..." (QS. An-Nisa: 124)*

Perbedaan dalam menafsirkan kebenaran ini dapat menciptakan ketegangan dalam masyarakat Muslim, terutama dalam konteks reformasi sosial dan kebijakan yang melibatkan masalah keadilan sosial. Pemahaman yang berbeda tentang kebenaran ini sering kali menjadi kendala dalam mewujudkan perubahan sosial yang berdasarkan pada prinsip Islam yang adil dan penuh kasih.

3. Reformasi Sosial Berdasarkan Kebenaran Islam

Dalam rangka menyelaraskan kebenaran pragmatik dengan nilai-nilai Islam, perlu dilakukan reformasi sosial yang memperhatikan dua aspek penting: pertama, pentingnya penanaman nilai kebenaran dalam masyarakat melalui pendidikan yang berbasis pada ajaran Islam yang menekankan pada kebenaran moral dan keadilan sosial; kedua, penerapan kebenaran pragmatik dalam konteks sosial yang mengedepankan solusi praktis namun tetap menjaga prinsip moral yang ada dalam Islam.

Reformasi sosial ini dapat dimulai dengan pendidikan moral dan akhlak yang memperkenalkan generasi muda kepada nilai-nilai Islam, termasuk kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keadilan. *Islamic social reformers* seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida telah mengusulkan pendekatan yang lebih progresif dalam

menafsirkan ajaran Islam untuk menanggapi tantangan sosial dan moral zaman modern. Mereka mendorong kebebasan berpikir, peningkatan pendidikan, dan keadilan sosial dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang kompleks (Abduh, 2016; Al Maksawi Al Ari, 2000).

Selain itu, dalam praktik pemerintahan, reformasi sosial yang berbasis pada kebenaran Islam harus mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Pemerintah yang adil dan berkesejahteraan bagi seluruh rakyat, tanpa memandang status sosial atau agama, harus menjadi landasan kebijakan publik. Al-Qur'an mengajarkan pentingnya kesejahteraan sosial sebagai bentuk penerapan kebenaran yang adil, sebagaimana tercermin dalam ayat: "*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*" (QS. Al-Mumtahanah: 8)

Reformasi sosial juga mencakup penyelesaian konflik sosial yang mungkin timbul akibat perbedaan interpretasi kebenaran dalam masyarakat. Melalui dialog, pendidikan, dan pendekatan yang lebih inklusif, dapat diusahakan untuk mempertemukan berbagai pendapat yang berbeda dan mencari solusi bersama yang berpijak pada prinsip-prinsip Islam yang universal.

Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa kebenaran dalam perspektif Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pragmatisme murni. Islam tidak hanya menilai kebenaran dari manfaat praktisnya, tetapi juga mengutamakan landasan moral dan spiritual yang tercermin dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Dimensi ini menunjukkan bagaimana Islam memberikan relevansi yang kuat terhadap penerapan nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berlandaskan keadilan.

Islam menambahkan dimensi kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keadilan pada konsep pragmatik, menjadikannya lebih berorientasi pada pembentukan hubungan sosial yang bermakna. Nilai-nilai ini tidak hanya memandu individu dalam kehidupan pribadi, tetapi juga menjadi landasan dalam politik dan kebijakan publik. Transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan bersama adalah prinsip utama yang diamanatkan dalam ajaran Islam untuk menciptakan sistem sosial yang lebih baik.

Namun, tantangan dalam menerapkan nilai-nilai ini tetap signifikan, seperti kesenjangan antara teori dan praktik serta perbedaan interpretasi nilai-nilai kebenaran. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan reformasi sosial yang mengintegrasikan pendidikan nilai-nilai Islam dengan pendekatan pragmatik yang tetap menjaga prinsip moral. Dengan penyelarasan ini, Islam dapat memberikan solusi yang tidak hanya praktis tetapi juga berbasis etika untuk membangun keadilan, kesejahteraan, dan harmoni sosial yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abduh, M. (2016). *Risalah Tawhid* (A. Terj. M. Ali (ed.); 1st ed.). Titah Surga.
- Al-Ghazali. (1963). *Ihya' Ulum al-Din*. In *Dār al-Ma'rifah*. BRILL.
<https://doi.org/10.1163/9789004662087>
- Al Bukhari, A. A. M. bin I. bin I. (1985). *Sahih Bukhari*. In *Sahih Bukhari* (Vol. 1, Issue 1).
- Al Maksawi Al Ari, M. (2000). *Al Islam wa al Hadharah al Gharbiyah*. Foundation of Islamic - Qom.
- Arifin, S., Muthohirin, N., Tongat, T., & Wahyudi, W. (2018). Interseksi Hak Asasi Manusia dan Sharī'ah di Indonesia. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 12(2), 279–305. <https://doi.org/10.15642/islamica.2018.12.2.261-287>
- Baderin, M. A., Kazhim, M., Arifin, E., Aswidah, R., & Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) (Jakarta). (2010). *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Bakewell, C. M., & James, W. (1907). Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking. *The Philosophical Review*, 16(6).
<https://doi.org/10.2307/2177297>
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'anul Karim*. In *Kemenag RI*. Toha Putra.
- Fazrul, R. (1984). Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. In *Archives de Sciences Sociales des Religions* (Vol. 58, Issue 2).
- James, W. (2006). Pragmatism: A new name for some old ways of thinking. In *Pragmatism: A new name for some old ways of thinking*.
<https://doi.org/10.1037/10851-000>
- Lewis, C. I., & Dewey, J. (1930). The Quest for Certainty: A Study of the Relation of Knowledge and Action. *The Journal of Philosophy*, 27(1), 14.
<https://doi.org/10.2307/2014669>
- Masang, A. (2020). Kedudukan Filsafat dalam Islam. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 11(1), 30–55.
- Nisa, K. (2016). Al-Ghazali: Ihya' Ulum Al-Din Dan Pembacanya. *Jurnal Ummul Qura*, 8(2).
- Peirce, C. S. (1878). Illustrations of the logic of science. How to make our ideas clear. *Popular Science Monthly*, 12(January), 286–302.
<https://philpapers.org/rec/PEIHTM>
- Rahman, I. (2020). Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. In *Lex et Societatis* (Vol. 3, Issue 1, pp. 72–82).
<https://doi.org/10.31219/osf.io/63cav>